

**2024**

# **LAPORAN TAHUNAN WBK**

**FITRI MAYAWATI SKM**

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan program strategis dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya berkesinambungan dalam berbagai bidang, seperti tata laksana, pengawasan, pelayanan publik, dan manajemen SDM.

Pembangunan Zona Integritas didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). ZI merupakan strategi untuk mempercepat reformasi birokrasi dengan membangun unit kerja pelayanan percontohan yang bebas dari korupsi dan memberikan pelayanan yang prima.

Tujuan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM adalah untuk:

- Mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Tahapan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM adalah:

1. Mencanangkan ZI pada unit kerja
2. Membangun enam area perubahan, yaitu:
  - Manajemen perubahan
  - Penguatan tata laksana
  - Penguatan manajemen SDM
  - Penguatan akuntabilitas kinerja
  - Penguatan pengawasan
  - Peningkatan kualitas pelayanan publik

## II. TUJUAN

1. Memperoleh gambaran pelaksanaan kegiatan yang berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Memperoleh hasil desk reviu Kinerja Implementasi WBK tahun 2024

## III. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
3. Permenpan RB Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
4. Undang-Undang No 30 tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## IV. HASIL KEGIATAN

Kegiatan WBK di Timker 5 telah dilaksanakan pada awal tahun 2024, namun untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan maka SK Tim WBK dilakukan reviu pada tanggal 22 Juli 2024. SK No HK.02.03/1/ 1782 /2024 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada BKK Kelas I Bandung Tahun 2024

### 1). POKJA 1

**Managemen Perubahan**, tugasnya :

- Menyusun tim kerja zona integritas Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung
- Menyusun dokumen perencanaan kerja percepatan terwujudnya wilayah bebas dari korupsi (WBK)
- Pemantauan dan evaluasi percepatan terwujudnya wilayah bebas dari korupsi
- Mendorong percepatan pola pikir dan budaya di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung
- Mendorong AOC untuk melaksanakan program kerja yang sudah disusun

Telah dilaksanakan penyusunan tim kerja zona integritas BKK Kelas I Bandung dan adanya dokumen perenc

anaan kegiatan dari masing-masing pokja 1 s/d 6

Kegiatan yang rutin dilakukan diantaranya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang mendukung terlaksananya tugas pokja, yakni diantaranya :

1. Monev Penataan tatalaksana

Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan penataan tatalaksana berjalan sesuai dengan rencana kerja triwulan. Berbagai mekanisme pengelolaan tata kelola telah diterapkan, termasuk digitalisasi pelayanan dan optimalisasi prosedur kerja

Terdapat kendala pada pertengahan tahun diantaranya :

- a. Keterlambatan pemasangan Media KIE
- b. Kurangnya koordinasi dalam internalisasi budaya kerja
- c. Evaluasi terkait keselarasan antara program-program kegiatan dengan tujuan ZI masih dalam proses dan belum selesai sepenuhnya

Kondisi ini telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan capaian WBK, percepatan pemasangan media KIE serta melakukan kegiatan sosialisasi dan evaluasi keselarasan program

2. Monev Penguatan Pengawasan

Sejumlah laporan pengaduan masyarakat yang masuk melalui berbagai kanal pengaduan, dan seluruh pengaduan telah ditindaklanjuti sesuai prosedur.

Terdapat kendala pada pertengahan tahun diantaranya :

- a. Terlambatnya pelaporan karena keterbatasan SDM yang bertugas menangani pengaduan
  - b. Dokumentasi pengaduan masih belum lengkap dalam hal pencatatan dan pelaporan
- Kondisi ini telah ditindaklanjuti dengan mengoptimalkan sistem pelaporan pengaduan masyarakat dengan pengingat berkala melalui grup komunikasi, termasuk penerapan sistem digital yang mempermudah pelaporan. Di samping itu, dokumentasi pelaporan secara rutin dilengkapi dan ditingkatkan dengan baik

3. Monev Peningkatan Kualitas Pelayanan

Pelayanan publik yang berkualitas adalah inti dari pembangunan ZI.

Terdapat kendala pada pertengahan tahun diantaranya :

- a. Kelengkapan informasi masih terbatas

b. Lamanya waktu pelayanan masih belum sesuai target

Kondisi ini telah ditindaklanjuti dengan mengoptimalkan peningkatan kapasitas pelayanan dan peningkatan kelengkapan informasi

4. Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Kerja, Peningkatan Pelayanan Prima, dan Peningkatan Akuntabilitas

Sosialisasi dan internalisasi budaya kerja dilakukan secara intensif melalui berbagai kegiatan pelatihan, seminar, dan diskusi kelompok terarah. Peningkatan pelayanan prima terwujud melalui pelaksanaan layanan digital dan optimalisasi sistem antrian. Peningkatan akuntabilitas diwujudkan melalui pelaporan berkala dan transparansi informasi publik

Terdapat kendala pada pertengahan tahun diantaranya :

- a. Belum semua wilker memahami secara mendalam nilai-nilai budaya kerja baru
- b. Masih mengalami keterbatasan dalam implementasi layanan berbasis digital.

Kondisi ini telah ditindaklanjuti dengan mengupayakan sosialisasi budaya kerja dan optimalisasi layanan berbasis digital melalui pelatihan intensif bagi SDM terkait

5. Pengelolaan Kantor Berhias

Pengelolaan kantor berhias berjalan sesuai rencana, dengan penambahan fasilitas umum, ruang kerja yang nyaman, dan program kebersihan lingkungan kantor.

Kantor yang bersih dan tertata rapi meningkatkan produktivitas pegawai serta memberikan kesan positif kepada masyarakat yang datang

Terdapat kendala pada pertengahan tahun yakni adanya keterlambatan pengadaan fasilitas. Oleh karena itu dilakukan percepatan pengadaan dan pemasangan fasilitas pendukung

6. Peningkatan progres pada sebagian besar indikator pembangunan ZI.

Pembahasan: Evaluasi yang konsisten memberikan gambaran menyeluruh terkait perkembangan pembangunan ZI. Hasil ini menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan dan strategi tindak lanjut demi mencapai target WBK/WBBM

## 2). POKJA 2

**Penataan Tatalaksana**, tugasnya :

- Mereview standar operasional prosedur dan standar pelayanan, kegiatan utama

pendukung, dan lainnya

- E-office (memantau pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik)
- Mendorong pembentukan informasi publik dengan memantau pembaharuan informasi kepada masyarakat

Salah satu upaya penataan tata laksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan SOP AP) , penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik , serta keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah terutama Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan yang mengacu pada Peta Proses Bisnis Pengelolaan Kekarantinaan Kesehatan di pintu masuk negara. Target yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya penggunaan Teknologi Informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan
2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan, dan
3. Meningkatnya kinerja unit kerja/ satuan kerja.

Tujuan dilakukannya monev pada Penataan tatalaksana adalah :

1. Identifikasi Masalah: Mengidentifikasi masalah atau kendala yang muncul selama Penataan Tatalaksana
2. Rencana Tindak Lanjut: Menyusun rencana perbaikan berdasarkan hasil evaluasi.
3. Peningkatan Kinerja: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program WBK/WBBM.

Ruang lingkup monev yang dilakukan pada pokja 2 Penataan tatalaksana, diantaranya :

#### **A. SOP (Standard Operasional Prosedur )**

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi SOP semua kegiatan , dilakukan oleh Tim Pemantau SOP .Berdasarkan hasil dan pembahasan terhadap pelaksanaan Monitoring dan evaluasi SOP AP BKK Kelas I Bandung selama tahun 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

SOP yang dilakukan monitoring dan evaluasi adalah sebanyak 34 SOP AP, yang terdiri dari 29 SOP Proses Utama, yaitu yang berhubungan dengan kegiatan teknis BKK Kelas I Bandung, yang meliputi kegiatan di Tim Kerja 1, 2, 3, 4, dan 5, serta 5 SOP Proses.

Tabel

Jumlah SOP AP yang dilakukan Monev di BKK Kelas I Bandung Tahun 2024

No.	Berdasarkan Proses Bisnis KKP	Jumlah SOP
1.	SOP Proses Utama, yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Timker 1, 4 SOP</li> <li>- Timker 2, 14 SOP</li> <li>- Timker 3, 1 SOP</li> <li>- Timker 4, 3 SOP</li> <li>- Timker 5, 7 SOP</li> </ul>	29
2.	SOP Proses pendukung	5

#### 1). Monitoring Pelaksanaan SOP AP

Hasil monitoring SOP AP BKK Kelas I Bandung Tahun 2024 sebagai berikut :

Dari 34 SOP AP yang dilakukan monitoring, sebanyak 32 SOP AP yang berjalan dengan baik (94%) dan 2 SOP AP yang tidak berjalan dengan baik (6%).

Berikut SOP AP yang tidak berjalan dengan baik berdasarkan hasil monitoring triwulan IV :

1. SOP Skrining TB dan HIV
2. SOP Pencatatan dan Pelaporan Aset

Hal tersebut dikarenakan adanya SOP skrining TB HIV yang harus dipisah menjadi 2 SOP masing-masing, yaitu SOP skrining TB dan SOP skrining HIV. Kemudian pada SOP Pencatatan dan Pelaporan Aset, di tahapan mencetak dan menempel label BMN dinilai tidak berjalan dengan baik karena ada beberapa barang belum terinventarisir.

Selain itu, didapatkan 2 SOP baru dari Tim Kerja 1 yaitu SOP Identifikasi Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan dan SOP Pengolahan Data Surveilans

#### 2). Evaluasi SOP AP

Berdasarkan hasil evaluasi substansi SOP AP BKK Kelas I Bandung dari sebanyak 32 SOP AP, diperoleh hasil evaluasi sebagai berikut: Dari 34 SOP AP yang dilakukan penilaian, 32 SOP (94%) masih relevan dan sisanya sebanyak 2 SOP (6%) dinilai sudah tidak relevan sehingga harus dilakukan revisi.

## **B. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Aplikasi yang digunakan oleh BKK Kelas I Bandung pada tahun 2024 untuk menunjang kinerja kantor dalam pengukuran kinerja dalam Operasional Manajemen SDM dan dalam Pemberian Layanan Kepada Masyarakat, terdiri dari 2 jenis yaitu aplikasi dari pusat dan aplikasi hasil inovasi BKK Kelas I Bandung.

### **1) Hasil Monitoring dan Evaluasi**

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan teknologi dan informasi berupa aplikasi-aplikasi untuk menunjang kegiatan perkantoran dalam pengukuran kinerja, manajemen SDM dan pelayanan publik dilakukan untuk memonitoring dan mengevaluasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar setiap kegiatan perkantoran yang berbasis aplikasi/elektronik dapat berjalan sesuai dengan target. Selain itu, sebagai bahan masukan dan rekomendasi untuk mendukung pengembangan sistem informasi perkantoran.

#### **1. Pengukuran Kinerja Unit**

- a) Pada aplikasi pengukuran kinerja unit pusat pada triwulan IV sebagian besar tidak ada kendala hanya ada aplikasi yg masih ada kendala yaitu:
  - Aplikasi SRIKANDI masih sering terjadi pemeliharaan sistem dan akses lama
- b) Pada aplikasi pengukuran kinerja inovasi BKK Kelas I Bandung, pada triwulan IV tidak ada evaluasi ataupun kendala pada aplikasi.

#### **2. Operasionalisasi Manajemen SDM**

- a) Pada aplikasi operasionalisasi manajemen SDM pusat pada triwulan IV sebagian besar tidak ada kendala hanya ada aplikasi yg masih ada kendala yaitu:
  - Portal e-office sering dilakukan maintenance
- b) Pada aplikasi operasionalisasi manajemen SDM inovasi BKK Kelas I Bandung, pada triwulan IV sebagian besar tidak ada kendala hanya ada aplikasi yg masih ada kendala yaitu:
  - Absen online masih ada perbedaan titik koordinat

#### **3. Pelayanan Publik**

- a) Pada aplikasi pelayanan publik pusat pada triwulan IV tidak ada evaluasi ataupun kendala pada aplikasi yang digunakan.
- b) Pada aplikasi pelayanan publik inovasi BKK Kelas I Bandung, pada triwulan IV sebagian besar tidak ada kendala hanya ada aplikasi yg masih ada kendala yaitu:
  - Pengguna jasa/Jemaah pada saat mengisi pendaftaran di SISOWI sering tidak dilanjutkan sampai pengisian di aplikasi SINKARKES sehingga data Jemaah belum terekam di sinkarkes



## 2). Saran dan tindak lanjut

### 1. Aplikasi Pusat

- a) Melakukan pemeliharaan sistem di luar jam kerja
- b) Meningkatkan performa aplikasi agar berjalan lebih cepat tanpa gangguan

### 2. Aplikasi Inovasi BKK Kelas I Bandung

- a) Memperbaharui aplikasi absen online
- b) Memperbaharui aplikasi SISOVI dengan memberikan link sinkarkes sebelum di klik selesai agar Jemaah melanjutkan pengisian data di SINKARKES dan data Jemaah terekam di SINKARKES
- c) Pengembangan fitur peminjaman kendaraan kantor
- d) Pembuatan informasi " Sentra Vaksinasi Internasional BKK Kelas I Bandung"
- e) Pembuatan manual book travel medicine
- f) Pengembangan aplikasi Go Dinas
- g) Pengembangan aplikasi substansi (PELATUK)
- h) Menambahkan fitur peringatan pada pengajuan ICV klinik/RS di aplikasi APIIK.
- i) Menambahkan fitur pengawasan kapal ke aplikasi SIMPLY

Menambahkan fitur upload dokumen LHKPN dan SPT di aplikasi SIMPLY

## **C. Keterbukaan Informasi Publik**

Monitoring pengelolaan dan pelayanan penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam hal ini ketua dan sekretaris memonitor kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan penyampaian informasi publik. Waktu pelaksanaan monitoring dilakukan sepanjang tahun dan dilaksanakan per triwulan. Hasil monitoring digunakan sebagai bahan identifikasi masalah yang timbul dan sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan dalam mencari solusi penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung.

1). Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, dipublikasikan di website BKK Bandung. <https://balaikarkesbandung.kemkes.go.id>

## DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA TAHUN 2024

No	Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala	Link Tautan
1	Profil Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domisili dan nomor kontak kantor</li> <li>• Visi dan Misi</li> <li>• Profil Balai Karkes Kelas I Bandung</li> <li>• Tugas Pokok dan Fungsi</li> <li>• Struktur organisasi</li> </ul>	<a href="https://bkkbandung.net/4082-2/">https://bkkbandung.net/4082-2/</a>
2	Program kerja dan kinerja, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Kerja dan Anggaran (RPK/RPD)</li> <li>• Agenda Balai Karkes Kelas I Bandung</li> <li>• Laporan akuntabilitas kinerja</li> <li>• Laporan tahunan</li> </ul>	<a href="https://bkkbandung.net/4522-2/">https://bkkbandung.net/4522-2/</a>
3	Ringkasan Laporan keuangan yang sudah di audit	-
4	Ringkasan Laporan Akses informasi publik, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi pola tarif</li> <li>• Alur layanan dan kontak person</li> <li>• Dumas dan WBS</li> </ul>	-
5	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Balai Karkes Kelas I Bandung	-
6	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Info lelang</li> </ul>	<a href="https://bkkbandung.net/4522-2/">https://bkkbandung.net/4522-2/</a>

Dari hasil Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, dipublikasikan di website BKK Bandung terdapat beberapa kendala diantaranya

1. Belum diletakkan sesuai dengan judul sehingga menyulitkan pengguna jasa atau Masyarakat untuk mengakses

Rekomendasi :

- Mohon dirapihkan sesuai dengan tempat atau folder yang seharusnya

- Agar informasi terbaru bisa segera di update
2. Belum adanya publikasi Ringkasan Laporan keuangan yang sudah di audit karena
- Kurang nya koordinasi antara tim terkait,
  - Informasi yang di upload bukan informasi terupdate (infomasi yang tercantum terakhir adalah tahun 2022)

Rekomendasi :

- Mohon dilengkapi untuk informasi terupdate,
  - Berkoordinasi dengan tim terkait
  - Perlu ada pembaharuan web terkait isi konten yang akan ditampilkan baik di web maupun medsos
3. Belum adanya Ringkasan Laporan Akses informasi publik, meliputi: Informasi pola tarif, Alur layanan dan kontak person, Dumas dan WBS karena :
- Kurang nya koordinasi antara tim terkait,
  - Informasi yang di upload bukan informasi terupdate (infomasi yang tercantum terakhir adalah tahun 2022),
  - Kanal sudah ada namun belum ada informasi mengenai alur dan tata cara penggunaan aplikasi yang tersedia

Rekomendasi :

- Mohon dilengkapi untuk informasi terupdate,
  - Berkoordinasi dengan tim terkait
  - Perlu ada pembaharuan web terkait isi konten yang akan ditampilkan baik di web maupun medsos terutama alur pelayanan
4. Belum adanya Publikasi Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Balai Karkes Kelas I Bandung

Kendala :

- Kurang nya koordinasi antara tim terkait,
- Informasi yang di upload bukan informasi terupdate (infomasi yang tercantum terakhir adalah tahun 2022)
- Kanal sudah ada namun belum ada informasi mengenai alur dan tata cara penggunaan aplikasi yang tersedia

Rekomendasi :

- Mohon dilengkapi untuk informasi terupdate,
- Berkoordinasi dengan tim terkait,

- Perlu ada pembaharuan web terkait isi konten yang akan ditampilkan baik di web maupun medsos terutama alur pelayanan

5. Sudah tersedia Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa

Kendala :

- Sudah ada namun belum diletakkan sesuai dengan judul sehingga menyulitkan pengguna jasa atau Masyarakat untuk mengakses

Rekomendasi :

- Mohon dirapihkan sesuai dengan tempat atau folder yang seharusnya,
- Agar informasi terbaru bisa segera di update

2). Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta di website Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung yaitu, Informasi terkait isu global maupun nasional mengenai kesehatan yang sedang terjadi, mengancam hajat hidup orang banyak dan mengganggu ketertiban umum, dan harus diumumkan pada saat diperlukan tanpa penundaan, yang sifat urgensinya akan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta meliputi:

- a. Epidemi dan pandemi penyakit, sekaligus obat yang dibutuhkan untuk menangkalnya,
- b. Penanganan kesehatan dalam situasi krisis/bencana alam, kegagalan teknologi dan bencana sosial, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan tanah longsor,
- c. Kebocoran/pelepasan bahan-bahan berbahaya, seperti asap beracun dalam kebakaran hutan,
- d. Keracunan obat dan makanan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT),
- e. Jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah; dan
- f. Informasi lain yang sifat urgensinya akan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung dapat dilihat pada link berikut: belum terdapat informasi yang memuat informasi ini

Kendala sebagai berikut :

- Kurang nya koordinasi antara tim terkait
- Informasi yang di upload bukan informasi terupdate (informasi yang tercantum terakhir adalah tahun 2022)

Rekomendasi :

- Mohon dilengkapi untuk informasi terupdate
- Berkoordinasi dengan tim terkait,
- Perlu ada pembaharuan di web terkait isi konten yang akan ditampilkan baik di web maupun medsos

3). Informasi yang wajib tersedia setiap saat

Daftar Informasi yang wajib tersedia setiap saat yang ada di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung sebagai berikut:

Daftar informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala tahun 2024

No	Informasi Yang Wajib Disediakan Setiap Saat	Link Tautan
1	Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan	<a href="https://bkkbandung.net/buletin/">https://bkkbandung.net/buletin/</a>
2	Sarana dan Prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya	-
3	Daftar SOP BKK Kelas I Bandung	<a href="https://bkkbandung.net/4522-2/">https://bkkbandung.net/4522-2/</a>
4	Laporan pengaduan masyarakat dan survey kepuasan masyarakat	<a href="https://www.instagram.com/p/C9OI09ov3su/?igsh=MWEyMGpiMmFvdDMzZg==">https://www.instagram.com/p/C9OI09ov3su/?igsh=MWEyMGpiMmFvdDMzZg==</a>
5	Pedoman Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung	-
6	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung	<a href="https://bkkbandung.net/4522-2/">https://bkkbandung.net/4522-2/</a>

Hal yang telah ditemui pada informasi yang wajib tersedia adalah :

1. Telah tersedia publikasi Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan

Kendala :

- Kualitas dan format konten,
- Masalah Teknis: seperti downtime situs web, gangguan pada platform, atau kesalahan format bisa mempengaruhi pengalaman pengguna,
- Hak Cipta dan Lisensi: Mengelola hak cipta dan lisensi untuk media, gambar, atau musik yang digunakan dalam konten,

- Kurangnya share/like, dll dari pegawai atau staf untuk membangun tumbuhnya sosmed, Belum masuknya staf wilker ke dalam tim PPID,
- Kurang nya ide konten/bahan konten khususnya konten promkes

Rekomendasi :

- Perlu adanya peran aktif seluruh pegawai untuk membangun tumbuhnya sosmed kantor Perlu mencari ide konten/bahan konten khususnya konten promkes di berbagai platfrom media,
- Perlu adanya revisi SK sehingga baik staf induk maupun wilker bisa ikut dalam kegiatan PPID,
- Konten yang diupload agar lebih beragam
- Konten yang sudah tersedia adalah bahan media yang bersifat online dan offline sedangkan kegiatan yang dilakukan BKK Bandung belum terupload agar terupload

2. Belum tersedianya Sarana dan Prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya

Kendala sebagai berikut :

- Kurang nya koordinasi antara tim terkait
- Informasi yang di upload bukan informasi terupdate (infomasi yang tercantum terakhir adalah tahun 2022)

Rekomendasi :

- Mohon dilengkapi untuk informasi terupdate, Berkoordinasi dengan tim terkait,
- Perlu ada pembaharuan web terkait isi konten yang akan ditampilkan baik di web maupun medsos

3. Sudah tersedianya Daftar SOP BKK Kelas I Bandung, sesuai SOTK terbaru

Kendala :

- Belum diletakkan sesuai dengan judul sehingga menyulitkan pengguna jasa atau Masyarakat untuk mengakses di web maupun medsos terutama alur pelayanan

Rekomendasi :

- Mohon dirapihkan sesuai dengan tempat atau folder yang seharusnya, agar informasi terbaru bisa segera di update

4. Sudah tersedianya publikasi Laporan pengaduan masyarakat dan survey kepuasan masyarakat.

Kendala :

- Hasil survey terkadang lupa di upload,
- Kurangnya partisipasi staf di wilker untuk melakukan survey
- Kurangnya koordinasi dengan tim terkait,
- Kurangnya sarana dan prasarana dumas,
- Kurangnya promosi tentang dumas dan survey,

Rekomendasi :

- Membuat jadwal rutin untuk survey,
- Perlunya partisipasi aktif semua staf untuk melakukan survey,
- Membuat konten terkait survey dan dumas,
- Perlu pembaharuan dan perlengkapan sarana dan prasarana dumas

5. Sudah tersedianya publikasi tentang Pedoman Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung

Kendala :

- Belum diupload ke dalam website sehingga sulit bagi Masyarakat untuk mengakses

Rekomendasi :

- Mohon dirapihkan sesuai dengan tempat atau folder yang seharusnya, agar informasi terbaru bisa segera di update

6. Sudah tersedianya publikasi Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung

Kendala :

- Sudah ada namun belum diupload ke dalam website sehingga sulit bagi Masyarakat untuk mengakses

Rekomendasi :

- Mohon dirapihkan sesuai dengan tempat atau folder yang seharusnya, agar informasi terbaru bisa segera di update

### 3). POKJA 3

**Penata Sistem Manajemen SDM**, tugasnya :

- Merencanakan kebutuhan pegawai sesuai deasis kompetensi
- Menyusun penetapan kinerja individu
- Mendorong pengembangan kebutuhan organisasi
- Menyusun penetapan kinerja individu
- Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawai
- Mengelola sistem informasi kepegawaian

Adapun hasil dari monev yang telah dilakukan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

#### 1. Perencanaan kebutuhan pegawai

Telah dilaksanakan tes pengadaan pegawai baik CPNS ataupun Calon PPPK dengan spesifikasi jabatan yang dibutuhkan dan kualikasi Pendidikan. Perencanaan ini dilakukan melalui mekanisme seleksi CASN Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan oleh seluruh Instansi Kementerian Kesehatan yang berada di Wilayah Jawa Barat terlebih lagi Kota Bandung pada khususnya. Pembahasan : kegiatan ini sebagai tahap seleksi bagi CASN baik itu CPNS maupun Calon PPPK tahun 2024. Baik itu tahap seleksi Tes Kemampuan Dasar maupun Tes Kemampuan Bidang untuk CPNS

#### 2. Mutasi Pegawai

Telah dilakukan proses mutasi pangkat dan jabatan untuk pegawai yang telah diajukan pada proses pengajuan sebelumnya. Pembahasan : Mutasi ini merupakan termasuk pada periode kenaikan pangkat yang telah di jadwalkan dari Biro OSDM Kemenkes RI pada Bulan Oktober dan Bulan Desember.

#### 3. Peningkatan kompetensi pegawai

Tercatat pegawai yang telah memenuhi target pemenuhan Jam Pelajaran bagi pegawai untuk memenuhi target PK Pimpinan tahun 2024 sebanyak 83 pegawai dari 83 pegawai atau telah mencapai 100% dari target 80%. Dan proporsi peningkatan kompetensi ini adalah

No	Kategori	Total Pelatihan	Persentase
1	Pelatihan	167	31,63%
2	Seminar/Webinar/Workshop	361	68,37%

Pembahasan : peningkatan kompetensi masih ada pegawai yang belum sesuai dengan basic kompetensi pegawai, akan tetapi persentasenya tidak terlalu banyak



#### 4. Hasil Kinerja Pegawai

Tercatat pegawai BKK Kelas I Bandung telah menyelesaikan pengisian Hasil Kinerja Pegawai untuk triwulan IV dan juga akhir tahun 2024. Dengan predikat kinerja pegawai mulai dari Sangat Baik, Baik, Butuh Perbaikan, Kurang, Sangat Kurang. Hasil kinerja pegawai ini untuk menyusun Hasil Kinerja Pimpinan yang akan dilaporkan pada atasan dari Pimpinan yaitu Sekretaris Ditjen P2. Pembahasan : bagaimana upaya pegawai untuk mendapatkan predikat kinerja yang baik untuk hasil kinerja pegawai ini

#### 5. Updating Data Pegawai

Telah dilakukan updating data pegawai pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA), untuk memutakhirkan data pegawai BKK Kelas I Bandung. Permasalahan : pada fasilitas input data di SIMKA masih ada proses input data yang dilakukan secara satu persatu, dan belum terdapat import data.

Dari hasil evaluasi tersebut maka rekomendasi yang diusulkan adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan tentang SDM atau Kepegawaian
2. Mensosialisasikan semua aturan dan perkembangan tentang SDM atau kepegawaian setiap adanya perubahan dan perkembangan

#### 4). POKJA 4

**Penguatan Akuntabilitas**, tugasnya :

- Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan dalam kegiatan utama jenis pendukung dan lainnya
- Pengeloaan akuntabilitas kinerja

Tujuan penguatan akuntabilitas kinerja pemerintahan mencakup :

1. Melihat keterlibatan pimpinan dalam penyusunan dan monitoring kinerja
2. Mengembangkan indikator kinerja yang jelas untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran
3. Memfasilitasi evaluasi berkala terhadap program dan kebijakan

Adapun ruang lingkup Pokja 4 ini diantaranya :

1. Keterlibatan Pimpinan
  - a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan

- b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja
- c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

## 2. Pengelolaan Akuntabilitas

- a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada
- b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil
- c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
- d. Indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART
- e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu
- f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
- g. Terdapat sistem informasi/mechanisme informasi kinerja
- h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

Adapun yang menjadi pengembangan selanjutnya sebagai catatan reform di pokja 4 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan capaian kinerja unit kerja
  - Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih
  - Jumlah Sasaran Kinerja
  - Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih
2. Pemberian Reward and Punishment
  - Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi
3. Kerangka Logis Kinerja
  - Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai?

Dalam hal ini kendala yang ditemui adalah :

1. Kurang tertibnya pengisian monev Perjanjian Kinerja sehingga rekap dokumen mengalami keterlambatan
2. Pemantauan pencapaian kinerja secara berkala per triwulan belum dilengkapi dengan dokumen yang lengkap, seperti undangan, absensi, notulensi, dan gambar. Pemantauan berkala meliputi pembahasan dan permasalahan yang akan ditindaklanjuti.
3. Pengembangan kegiatan melalui aplikasi belum optimal secara relaxe time, diharapkan dapat digambarkan pengembangan capaiannya melalui data grafik,

4. Tim kerja Sakip/Lakip diupayakan yang sudah bersertifikat
5. Kinerja substansi atau tim kerja yang sudah mencapai 100% belum diberikan reward, (reward dapat berupa sertifikat penghargaan). Begitupun dengan Kinerja substansi atau tim kerja yang belum mencapai 100% ternyata belum diberikan punishment (punishment dapat diberikan berupa teguran).

Dari hasil evaluasi tersebut maka rekomendasi yang diusulkan adalah :

1. Penertiban kembali dokumen pengisian monev Perjanjian Kinerja
2. Pemantauan pencapaian kinerja secara berkala per triwulan harus dilengkapi dengan dokumen yang lengkap, seperti undangan, absensi, notulensi, dan gambar
3. Pengembangan kegiatan melalui aplikasi secara relaxe time harus digambarkan capaiannya melalui data grafik,
4. Tim kerja Sakip/Lakip diupayakan mengikuti pelatihan untuk melengkapi sertifikat
5. Kinerja substansi atau tim kerja yang sudah mencapai 100% dapat diberikan reward, berupa sertifikat penghargaan. Begitupun dengan Kinerja substansi atau tim kerja yang belum mencapai 100% dapat diberikan punishment berupa teguran.

## **5). POKJA 5**

**Penguatan Pengawasan**, tugasnya :

- Pengendalian Gratifikasi
- Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
- Mengelola pengaduan masyarakat
- Mengelola Whistle Blowing System
- Penanganan Benturan Kepentingan

### **1. Pengendalian Gratifikasi**

Dari hasil evaluasi di BKK Kelas I Bandung selama triwulan IV tahun 2024, tidak ditemukan adanya laporan yang terindikasi pada gratifikasi. Namun terdapat penolakan terhadap pemberian yang disampaikan oleh seorang mantan mahasiswa yang pernah magang terhadap kepala administrasi umum di bulan November 2024.

Masih belum adanya laporan gratifikasi dari staf kepada pihak UPG merupakan kondisi yang sebenarnya. Tim UPG telah melakukan upaya pendekatan melalui penyuluhan langsung maupun tidak langsung agar jika terdapat gratifikasi pada proses penyelenggaraan kegiatan maka dapat segera dilaporkan dan ditindaklanjuti baik secara langsung melalui GOL KPK maupun UPG.

Capaian kinerja UPG BKK Kelas I Bandung triwulan IV tahun 2024:

- a. Telah terlaksana rapat pengelolaan UPG untuk membahas perencanaan kegiatan selama 1 tahun dan melakukan Upaya public campaign tentang gratifikasi
- b. Telah terlaksana pembuatan poster/banner terkait PC pada bulan april, mei dan juni untuk kegiatan arus mudik lebaran idul fitri dan kegiatan embarkasi haji
- c. Telah terlaksana penyampaian campaign gratifikasi pada saat pemberian informed consent kepada konsumen yang melakukan penyuntikan vaksinasi meningitis
- d. Terdapat nya kegiatan sosialisasi Antikorupsi pada kegiatan Skrinning TB/HIV, sosialisasi SOP Penerimaan Tamu dalam rangka Pengendalian Gratifikasi di Induk maupun wilker dan sosialisasi Pengendalian Gratifikasi melalui medsos/website dan bulletin

Kendala :

Capaian pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi yang belum terealisasi di triwulan IV adalah belum adanya laporan terkait adanya indikasi gratifikasi di setiap wilayah kerja maupun induk secara aktif

Rekomendasi :

Dari unit pengendalian gratifikasi di BKK Kelas I Bandung diharapkan ke depan ada laporan terkait indikasi gratifikasi, reviuw SOP UPG untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan serta mengadakan pelatihan untuk anggota tim UPG tentang Unit Pengendalian Gratifikasi maupun bimbingan tentang pengisian monev PPG

## 2. **Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Monitoring evaluasi SPIP di Lingkungan Kantor Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung pa triwulan IV tahun 2024, dimana kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :

1. Rapat review SPIPT oleh SKI pada tanggal 4 dan 5 November 2024  
Reviu tim SKI ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa pengendalian telah berjalan sesuai tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik
2. Hasil review komponen maturitas penyelenggaraan SPIP dinilai sudah baik
3. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP BKK Kelas I Bandung tahun 2023/2024 mencapai level 5 (lima) atau "optimum". Dengan tingkat maturitas optimum, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP BKK kelas I bandung telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik. Dimana semua sistem pengendalian yang dibangun telah berjalan dengan efektif dan mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga berdampak pada efektifitas serta efisiensi tugas dan fungsi organisasi, tidak

adanya permasalahan dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, serta ketaatan seluruh pegawai terhadap perundang-undangan.

4. Selanjutnya penilaian manajemen risiko, menunjukkan bahwa BKK kelas I Bandung telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko. Kegiatan pengendalian terhadap risiko yang teridentifikasi di BKK kelas I Bandung berisi kegiatan pengendalian yang sudah berjalan baik. Kegiatan pengendalian sudah berjalan dalam mengendalikan risiko yang telah teridentifikasi. Kegiatan pengendalian yang telah efektif akan dipertahankan.
5. Sedangkan penilaian efektivitas pengendalian korupsi, menunjukkan bahwa pada BKK kelas I Bandung sudah baik, terbukti tugas dan fungsi pada struktur dan proses efektivitas serta efisiensi pencapaian tujuan organisasi, tidak ada permasalahan dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset.
6. Penyusunan Rencana Kerja baru SPIP
7. Penyusunan Manajemen Risiko oleh masing-masing tim kerja dan adum untuk tahun 2025

Kendala :

- Analisis Risiko Kepegawaian belum sesuai format
- Terdapat Analisis Risiko pada tim kerja 1 sd 5 belum maksimal
- Kegiatan pengendalian sebagian besar sudah ada namun baru kegiatan pengendalian unit keuangan dan gratifikasi yang sudah disosialisasikan
- Dokumen SPIP sesuai borang-borang untuk aplikasi SPIPT belum lengkap

Rekomendasi :

1. Tim SPIP melakukan sosialisasi ke wilayah kerja BKK Kelas I Bandung terkait SPIPT, manajemen risiko dan pencegahan korupsi
2. Melakukan monitoring evaluasi berkala setiap triwulan

### 3. **Pengaduan Masyarakat**

Berdasarkan hasil rekapitulasi triwulan IV, media penerimaan penyampaian pengaduan masyarakat di lingkungan BKK Kelas I Bandung dalam kurun waktu Oktober s.d. Desember Tahun 2024, terdapat pengaduan yang masuk di lingkungan wilayah kerja BKK Kelas I Bandung. Dari hasil pengaduan masyarakat ini akan ditindaklanjuti untuk perbaikan pelayanan BKK Kelas I Bandung yang lebih baik.

Monitoring dan evaluasi di triwulan IV, terdapat uraian pengaduan terkait system pendaftaran online vaksinasi internasional yang dinilai belum jelas yang berdampak pada tidak terpenuhinya layanan vaksinasi secara keseluruhan.

Analisa yang didapat adanya miskomunikasi antara admin whatsapp kantor BKK Bandung dengan pelapor, dimana pelapor tidak melanjutkan pendaftaran ke aplikasi sinkarkes sehingga pelayanan vaksinasi meningitis tidak terdaftar.

Sebagian besar pengaduan terkait masalah pelayanan publik di beberapa lokasi, khususnya terkait waktu tunggu dan kelengkapan informasi. Melalui aplikasi.

Pemasangan Media KIE: Akan dilakukan percepatan dalam pemasangan media KIE yang tertunda. Koordinasi antar-unit kerja diperkuat untuk memastikan semua target pemasangan dapat tercapai sebelum akhir tahun.

Kendala:

- Keterlambatan dalam pengelolaan pengaduan masyarakat, terutama dalam hal tindak lanjut dan pelaporan yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia di bagian pengaduan, terutama admin
- Belum tersedianya ruang pengaduan masyarakat sebagai bentuk optimalisasi pelayanan public bagi masyarakat
- Inkonsistensi dalam dokumentasi pengaduan masyarakat di beberapa unit.

Rekomendasi:

- Merekrut atau mengalihkan personel yang ada untuk memperkuat unit yang bertanggung jawab dalam penanganan pengaduan masyarakat.
- Menyiapkan sistem otomatisasi dalam pengelolaan pengaduan serta pelaporan pengaduan masyarakat untuk meminimalisir kesalahan dalam proses penanganan pengaduan
- Optimalisasi sistem pelaporan pengaduan masyarakat dengan pengingat berkala melalui grup komunikasi, termasuk penerapan sistem digital yang mempermudah pelaporan.
- Reminder Pelaporan: Pengingat (reminder) pelaporan pengaduan telah diaktifkan melalui grup WhatsApp, dan hal ini telah membantu mengurangi keterlambatan pelaporan di beberapa unit.
- Dilakukan percepatan dalam pemasangan media KIE yang tertunda. Koordinasi antar-unit kerja diperkuat untuk memastikan semua target pemasangan dapat tercapai sesuai rencana

#### **4. Whistle Blowing System**

Rekap data pengaduan dilakukan setiap bulan, baik ada maupun tidak ada pengaduan. Namun proses rekapitulasi data dibuat per triwulan. Pada triwulan IV tahun 2024 tidak terdapat pelaporan atas pelanggaran yang dilakukan pegawai BKK Kelas I Bandung. Adapun sarana yang disediakan BKK Kelas I Bandung bagi pegawai yang akan menyampaikan pengaduan antara lain:

- a) Surat Masuk
- b) Email. Email ke [balaikarkesbandung@kemkes.go.id](mailto:balaikarkesbandung@kemkes.go.id)
- c) Kotak Pengaduan di masing masing kantor induk maupun wilayah kerja
- d) Portal WBS <https://wbs.kemkes.go.id> di website BKK Kelas I Bandung yaitu <https://balaikarkesbandung.kemkes.go.id/>).

Kendala :

Tidak terdapat aduan tentang dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi pada triwulan IV tahun 2024 yang masuk melalui saluran pengaduan Whistle Blowing System (WBS).

Rekomendasi :

Peningkatan kegiatan sosialisasi mengenai tata cara pelaporan menggunakan aplikasi WBS/ cara pembuatan akun di aplikasi WBS Itjen Kementerian Kesehatan serta cara pelaporannya. Selain itu perlu peran aktif dari tim pengelola WBS untuk menjemput bola mencari pengaduan ke Itjen kemenkes

#### **2. Penanganan Benturan Kepentingan**

Dari hasil monitoring terhadap Penanganan Konflik Kepentingan selama triwulan IV 2024 tidak ada teridentifikasi potensi benturan kepentingan pada semua bagian dan layanan di BKK Kelas I Bandung.

Penanganan Benturan Kepentingan di BKK Kelas I Bandung akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi berkala dan rutin dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK).

Rekomendasi :

Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap Penanganan Konflik Kepentingan selama triwulan IV tahun 2024 tim Benturan kepentingan akan terus melakukan sosialisasi berkala kepada pegawai baik secara langsung atau tidak langsung melalui media sosialisasi BKK Kelas I Bandung serta menghimpun data identifikasi potensi benturan kepentingan dari tiap-tiap tim kerja di BKK Kelas I Bandung.

Tim Benturan kepentingan juga akan melakukan identifikasi kembali di tahun 2025.

## 6). POKJA 6

**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**, tugasnya :

- Mereview standar pelayanan
- Mendorong percepatan budaya pelayanan prima
- Pengelolaan pengaduan
- Penilaian kepuasan terhadap masyarakat
- Pemanfaatan teknologi informasi

No	Komponen/sub komponen	Dokumen				Keterangan
		Ada	Tidak	Lengkap	Tidak Lengkap	
1	Standart Pelayanan					
	Terdapat kebijakan standart pelayanan	✓		✓		
	Standart pelayanan telah di maklumkan	✓		✓		
	Dilakukan Reviu dan perbaikan atas standart pelayanan	✓		✓		
	Telah melakukan publikasi atas standart pelayanan dan maklumat pelayanan	✓		✓		
2	Budaya Pelayanan Prima					
	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	✓		✓		
	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	✓		✓		
	Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan	✓		✓		
	Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standart	✓		✓		
	Terdapat sarana layanan terpadu terintegrasi	✓		✓		
	Terdapat inovasi pelayanan	✓		✓		
3	Pengelolaan Pengaduan					



	Terdapat Media Pengaduan dan Konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR	✓		✓		
	Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan	✓		✓		
	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan-keluhan dan konsultasi	✓		✓		
4	<b>Penilaian kepuasan terhadap masyarakat</b>					
	Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	✓		✓		
	Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	✓		✓		
	Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	✓		✓		
5	<b>Pemanfaatan teknologi Informasi</b>					
	Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	✓		✓		
	Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi	✓		✓		
	Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	✓		✓		

Selama tahun 2024, maka kegiatan pokja 6 telah dilakukan evaluasi yang meliputi perkembangan kegiatan dan upaya peningkatan pelayanan publik. Adapun perkembangan dari kegiatan pokja 6 adalah sebagai berikut :

a) Standart Pelayanan

- Semua standart pelayanan telah di revisi sesuai dengan adanya perubahan nomenklatur dan pergantian kepala BKK Kelas I Bandung sebanyak 19 dokumen
- Standart pelayanan maklumatkan dan dipublikasikan di Web site BKK Kelas I Bandung dan telah di tempel di dinding wilker masing-masing.

b) Budaya Pelayanan Prima

- Telah dilakukan sosialisasi penerima tamu pada tenaga Outsourcing
- Informasi terkait pelayanan di BKK Kelas I bandung mudah diakses baik melalui website ataupun media social yaitu : Instagram, Facebook, dan tik tok

- Memberikan penghargaan berupa sertifikat kepada petugas pemberi pelayanan yang mendapatkan nilai paling tinggi dari hasil penilaian survey kepuasan masyarakat (SKM)
- Terdapat sarana pelayanan terpadu yaitu pelayanan vaksinasi dan pendaftaran dapat melalui online

c) Pengelolaan pengaduan

- Media Pengaduan telah yang terintegrasi dengan SP4N- LAPOR terdapat di web site BKK Kelas I Bandung
- Adanya layanan konsultasi
- Belum ada ruang khusus Pengelolan Pengaduan
- Keluhan - keluhan yang masuk melalui google reviu langsung ditiundak lanjuti dalam waktu kurang dari 24 jam

d) Penilaian Kepuasan terhadap Masyarakat

- Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat dan survey IPAK pada pengguna jasa di pelabuhan, bandar udara dan pelayanan vaksinasi melaui questioner dan barkode
- Hasil dari SKM tersebut dibuatkan laporan dan dilakukan monev setiap triwulan

e) Pemanfaatan teknologi Informasi

- Pelayanan yang dilakukan menggunakan teknologi akan tetapi belum ada manual book pada setiap aplikasi yang digunakan
- Terdapat data base dan dilakukan perbaikan secara berkala

Rekomendasi secara menyeluruh terhadap kegiatan di pokja 6 adalah :

- Melengkapi dokumen yang belum lengkap
- Membuat dokumen yang belum ada
- Mengadakan Ruang pengelolaan pengaduan

Berdasarkan hasil desk reviu kinerja Implementasi WBK tahun 2024 maka BKK Bandung memperoleh nilai sebesar 88,79. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan penilaian disbanding tahun sebelumnya yakni sebesar 85,82. Adapun rincian hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

#### BERITA ACARA HASIL DESK REVIU KINERJA IMPLEMENTASI WBK TAHUN 2024

Pada hari ini Rabu, Tanggal 11 Bulan Oktober Tahun 2024 telah dilaksanakan desk reviu Kinerja Implementasi WBK Satker berikut ini :

NO	MATERI	NILAI	REKOMENDASI PERBAIKAN
<b>I</b>	<b>KOMPONEN PENGUNGKIT</b>	<b>60</b>	<b>54,76</b>
<b>A</b>	<b>Aspek Pemenuhan</b>	<b>30</b>	<b>27,7</b>
1	Managemen Perubahan	4	3
2	Penataan Tatalaksana	3,5	3,5
3	Penataan Sistem Managemen SDM	5	4,48
4	Penguatan Akuntabilitas	5	4,69
5	Penguatan Pengawasan	7,5	7,31
6	Penguatan kualitas Pelayanan Publik	5	4,72
<b>B</b>	<b>Aspek Reform</b>	<b>30</b>	<b>27,06</b>
1	Managemen Perubahan	4	3,67
2	Penataan Tatalaksana	3,5	3
3	Penataan Sistem Managemen SDM	5	5
4	Penguatan Akuntabilitas	5	3,54
5	Penguatan Pengawasan	7,5	6,88
6	Penguatan kualitas Pelayanan Publik	5	5
<b>II</b>	<b>KOMPONEN HASIL</b>	<b>40</b>	<b>34,03</b>
<b>1</b>	<b>Birokrasi yang bersih dan akuntabel</b>	<b>22,5</b>	<b>17,71</b>
a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	17,5	16,46
b	Capaian Kinerja Lebih Baik daripada Capaian Kinerja Sebelumnya	5	1,25
<b>2</b>	<b>Pelayanan Publik yang Prima</b>	<b>17,5</b>	<b>16,32</b>
	Nilai Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (Survey Eksternal)	17,5	16,32
	<b>TOTAL NILAI</b>	<b>100</b>	<b>88,79</b>

## V. SARAN DAN MASUKAN

Dari hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, maka ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan sebagai bahan masukan, yakni :

1. Evaluasi yang konsisten memberikan gambaran menyeluruh terkait perkembangan pembangunan ZI. Hasil ini menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan dan strategi tindak lanjut demi mencapai target WBK/WBBM
2. Peningkatan pelayanan prima melalui pelaksanaan layanan digital dan optimalisasi sistem antrian. Begitu pun upaya peningkatan akuntabilitas yang diwujudkan melalui pelaporan berkala dan transparansi informasi publik
3. Peningkatan penyusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan SOP AP), penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik , serta keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah terutama Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan yang mengacu pada Peta Proses Bisnis Pengelolaan Kekeparantinaan Kesehatan di pintu masuk negara.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan teknologi dan informasi berupa aplikasi-aplikasi untuk menunjang kegiatan perkantoran dalam pengukuran kinerja, manajemen SDM dan pelayanan public. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar setiap kegiatan perkantoran yang berbasis aplikasi/elektronik dapat berjalan sesuai dengan target
5. Peningkatan pelaksanaan publikasi Informasi tentang tata cara pengaduan masyarakat serta penggunaan SP4N Lapor
6. Peningkatan kualitas pelayanan tentang SDM atau Kepegawaian serta mensosialisasikan semua aturan dan perkembangan tentang SDM atau kepegawaian
7. Peningkatan kinerja substansi atau tim kerja yang sudah mencapai 100% dengan pemberian reward, berupa sertifikat penghargaan. Begitupun dengan Kinerja substansi atau tim kerja yang belum mencapai 100% dapat diberikan punishment berupa teguran.
8. Peningkatan pelaporan terkait indikasi gratifikasi agar lebih disiplin dan mampu menjaga integritas dan reviuw SOP UPG untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan serta mengadakan pelatihan untuk anggota tim UPG tentang Program Pengendalian Gratifikasi
9. Peningkatan kegiatan sosialisasi maupun koordinasi tentang pelaksanaan kegiatan antikorupsi (Pengendalian Gratifikasi, Whistle Blowing System (WBS), Benturan Kepentingan) sebagai bagian untuk pengembangan wawasan guna implementasi Zona Integritas menuju WBK .

10. Optimalisasi sistem pelaporan pengaduan masyarakat dengan pengingat berkala melalui grup komunikasi, termasuk penerapan sistem digital yang mempermudah pelaporan.
11. Peningkatan pelayanan public dengan menyediakan ruang pengelolaan pengaduan masyarakat
12. Peningkatan kegiatan survey kepuasan masyarakat dan survey IPAK pada pengguna jasa di pelabuhan, bandar udara dan pelayanan vaksinasi melalui questioner dan barcode. Hasil survey kepuasan masyarakat dibuatkan laporan perbulan, dipublikasikan di internal untuk memperoleh perbaikan dan dilakukan monev setiap triwulannya

## VI. KESIMPULAN

Telah dilaksanakannya pelaporan WBK untuk tahun 2024 sebagaimana mestinya dan diharapkan dapat melakukan tindak lanjut dari hasil rekomendasi yang disarankan dan Upaya-upaya perbaikan melalui kelengkapan dokumen maupun sarana dan prasarana

Demikian laporan kegiatan WBK tahun 2024 pada BKK Kelas I Bandung telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga laporan ini dapat memberi manfaat pada pelaksanaan kegiatan di BKK Kelas I Bandung dan khususnya kegiatan di tim kerja 5 layanan Publik dan Zona Integritas

Bandung, Januari 2025



Fitri Mayawati SKM  
NIP. 197111191998032001